

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

**Cornelis Tagu Bore^{1,*)}, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani²⁾ dan Putu
Aristya Adi Wasita³⁾**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika, Bisnis dan Humaniora,
Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

**) Corresponding author:*
cornelisbore@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze factors affecting timeliness of financial reporting submission in West Sumba Regency. It is a quantitative research using primary data collected from questionnaires. The sample was determined by purposive sampling technique and obtained 50 respondents. The data analysis uses multiple linear regression with the help of software SPSS version 26. The research showed that human resources competences, the implementation of government accounting standards, inter-governmental control systems and the utilization of information technology had positive effect on the delivery timeliness of financial reporting submission in West Sumba Regency.

Keywords: *Timeliness of Financial Reporting Submission, Human Resources Competence, SAP Implementation, Government Internal Control System*

PENDAHULUAN

Sektor publik di Indonesia harus mampu mengelola keuangan secara transparansi dan akuntabel guna memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang mengalami penyempurnaan oleh peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa informasi yang disajikan pemerintah akan bernilai manfaat apabila memenuhi beberapa kriteria kualitas informasi yaitu: memiliki relevansi, kehandalan, serta dapat dibandingkan dan dimengerti. Setiap instansi diharuskan untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu sebab ketentuan ini telah ditetapkan dalam peraturan (Ardianto, & Eforis, 2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh gubernur/walikota/bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir.

Ketepatan waktu sebagai faktor penting dalam menjabarkan informasi yang relevan oleh setiap organisasi publik. Faktor ini disebabkan karena laporan keuangan merupakan informasi penting untuk pihak-pihak yang berkepentingan

untuk membuat keputusan (Eristanti & Putra, 2019). Ketepatan waktu menunjukkan bahwa informasi yang disediakan oleh pembuat laporan segera dirilis, dimana laporan tersebut sangat berguna bagi pembuat keputusan, sehingga informasi tersebut menjadi lebih relevan karena memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari itu, ketepatan waktu yakni faktor penting dalam mempublikasikan laporan keuangan. Pada dasarnya, ketepatan waktu ketika mempublikasikan laporan keuangan daerah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penggunaan teknologi secara tepat.

Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sumbawa Barat berhasil meraih WTP ketujuh dari penyajian laporan keuangan dari BPK. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumba Barat dalam pembuatan serta penyampaian laporan keuangan sering mengalami keterlambatan yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti SDM mengalami kompleksitas operasional serta kendala dan kesulitan untuk menyusun laporan. Kaitannya dengan kompleksitas operasional yaitu kapasitas SDM, implementasi SAP, SPIP serta pemakaian teknologi informasi. Adapun kompleksitas operasi yang dialami oleh BPKAD Kabupaten Sumba Barat yaitu kerumitan untuk menyajikan laporan keuangan, jumlah SDM yang tidak mencukupi, kompetensi SDM yang kurang mampu, sehingga instansi tidak mampu menerapkan SAP dan SPIP. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena di lihat dari latar belakang pendidikannya bukan akuntansi, pengalaman dalam bidang akuntansi, pengetahuan yang kurang akan penyajian laporan keuangan dan tidak memiliki keterampilan dalam menjalankan fungsi akuntansi sehingga mengakibatkan penyampaian laporan keuangan itu tidak tepat waktu. Adanya kelemahan sistem pengendalian internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumbawa Barat yakni beberapa pegawai belum memenuhi ketentuan dan minimnya koordinasi dengan pihak terkait untuk mengawasi dan mengendalikan laporan keuangan. Selain itu, pejabat yang berwenang belum menentukan kebijakan dan prosedur yang berlaku umum

Syamsir *et al* (2018) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia (SDM) ialah individu yang berperan penting dalam menjalankan aktivitas organisasi, dimana SDM sebagai aset utama organisasi yang perlu dikembangkan potensinya. Winidyaningrum & Rahmawati (2010) menyatakan bahwa laporan yang berkualitas dan tersaji secara tepat waktu harus didukung oleh SDM yang berkualitas dan berkompeten. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi setiap SDM yang dimiliki agar proses pelaksanaan operasional organisasi dapat berjalan secara optimal, terutama yang berkenaan dengan laporan keuangan (Maharani & Agustin, 2021) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa semakin baik kualitas SDM yang dimiliki oleh instansi pemerintahan maka laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan demikian, SDM memiliki keterlibatan penting dalam pembuatan laporan keuangan agar dapat dipublikasi secara tepat waktu. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh penelitian Basri *et al.*, (2021), Dewanti & Riharjo (2020), Astrawan *et al.*, (2016), dan Winidyaningrum & Rahmawati (2010), namun penelitian Prasetyo (2015) menunjukkan hasil berbeda bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan harus didasarkan pada SAP sebagaimana dalam ketentuan peraturan daerah. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 mengenai pemerintahan daerah dalam pasal 330, dinyatakan bahwasannya dalam penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah harus mengikuti aturan daerah. SAP menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan sarana untuk menginformasikan posisi keuangan daerah yang telah dilakukan oleh suatu instansi dalam periode tertentu. Penyusunan serta pelaporan keuangan pemerintah harus dilandaskan pada SAP guna memperlihatkan informasi yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkannya untuk keperluan pengambilan keputusan berkenaan dengan sektor ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian dari Dewanti & Riharjo (2020), Pujanira & Taman (2017), Ardianto dan Eforis (2019) menunjukkan hasil sama bahwa penerapan SAP berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah sedangkan penelitian Ardianto & Eforis (2019) dan Inapty & Martiningsih, (2016) menunjukkan penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan juga memiliki hubungan yang erat dengan oleh sistem pengendalian intern. SPIP berkenaan dengan laporan keuangan adalah penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, yang tujuannya untuk meyakinkan pihak-pihak pengguna laporan bahwa laporan keuangan tersebut akuntabel. Sistem pengendalian intern memiliki tujuan guna memastikan bahwasanya laporan keuangan yang disusun secara akuntabel serta transparan. Prasetyo (2015), Astrawan et al., (2016) dalam penelitiannya bahwasanya SPIP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan daerah sedangkan penelitian Basri et al., (2021) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan.

Pelaporan keuangan pemerintah tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi adalah salah satu cara untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membantu dan memudahkan dalam proses penyusunan informasi, sehingga informasi tersebut lebih mudah dipahami oleh penggunaannya dalam mengambil keputusan. Teknologi informasi dipakai guna melakukan pemrosesan serta penyimpanan informasi dan sebagai alat komunikasi guna menyebarkan informasi. Terdapat berbagai jenis komponen dari penggunaan teknologi informasi yang mencakup komputer, software, database, jaringan dan alat elektronik lainnya. Hasil penelitian dari Ardianto & Eforis (2019), Prasetyo (2015), Astrawan et al., (2016), Winidyaningrum & Rahmawati (2010) menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kehandalan serta ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian Maharani & Agustin (2021) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan konsep, fenomena dan hasil penelitian yang berbeda terkait dengan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, maka penelitian meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan manajer bekerja untuk tujuan organisasi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Manajemen memiliki cara pandang pengelolaan organisasi dengan konsep kebersamaan, kemitraan, pemberdayaan, saling percaya dan stewardan. Harmoni antara pemilik modal (principal) dan manajemen (*steward*) terbangun dalam hubungan kepemimpinan dan komunikasi. Sasaran utamanya adalah steward bertindak sesuai dengan keinginan principal dan steward akan menyelaraskan tujuannya dengan tujuan organisasi. Filosofi ini bagian penting dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Van Slyke, 2006 dalam penelitiannya dibidang akuntansi organisasi sektor publik menyatakan teori *stewardship* sering digambarkan sebagai alternatif dari teori agensi. Teori agensi mengasumsikan bahwa orang-orang bertindak oportunistik ketika tujuan pribadi mereka tidak selaras dengan tujuan utama mereka dan dapat bertindak atas biaya prinsipal mereka (Frederickson & Smith, 2003). Teori *stewardship*, sebaliknya mengemukakan *model of man* berdasarkan perilaku seorang steward diatur sedemikian rupa sehingga perilaku kolektifis pro-organisasional memiliki utilitas yang lebih tinggi daripada perilaku melayani diri sendiri yang individualistis (Davis et al., 1997). Teori *stewardship* juga mengedepankan pandangan bahwa individu, sering kali dapat dimotivasi oleh pertimbangan keadilan dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain (Buchanan, 1996). Aparat pemerintah yang menyajikan laporan keuangan perlu mengedepankan sikap melayani masyarakat dan menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan menyajikan informasi secara transparan untuk memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat.

Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 mengenai penyajian laporan keuangan, disebutkan bahwasannya kurangnya ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dapat dikarenakan laporan tidak dapat diakses oleh pengguna pada tanggal yang telah ditetapkan (BPK, 2010). Ketepatan waktu adalah cara guna melihat transparansi dan kualitas laporan yang dibuat oleh organisasi publik. Informasi yang dibagikan dalam laporan keuangan tersebut harus relevan supaya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi. (Mareta, 2017). Beberapa faktor yang penyebab kompleksitas operasi yaitu kapasitas SDM implementasi SAP, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta penggunaan teknologi informasi, dimana faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Kompetensi SDM

SDM yang bertugas untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan kompetensi agar hasil laporan yang disusunnya tersebut lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan (Animah et al., 2020). Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menjelaskan kapasitas SDM ialah kemampuan individu yang berada di organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi. Sudiarti & Juliarsa (2020) mengungkapkan bahwasannya kompetensi SDM ialah kemampuan individu yang berada di organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi.

Penerapan SAP

Penerapan SAP berbasis akrual yaitu guna menghitung jumlah biaya yang dibutuhkan guna menghasilkan pelayanan masyarakat, dan menetapkan biaya pelayanan yang harus dibayarkan oleh masyarakat (Wibowo et al., 2018). Penerapan SAP berbasis akrual akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, bisa dibandingkan serta dipahami untuk mengambil keputusan (Ardianto & Eforis, 2019). Pujanira & Taman, (2017) menjelaskan bahwa SAP yakni prinsip dasar akuntansi untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan di instansi pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

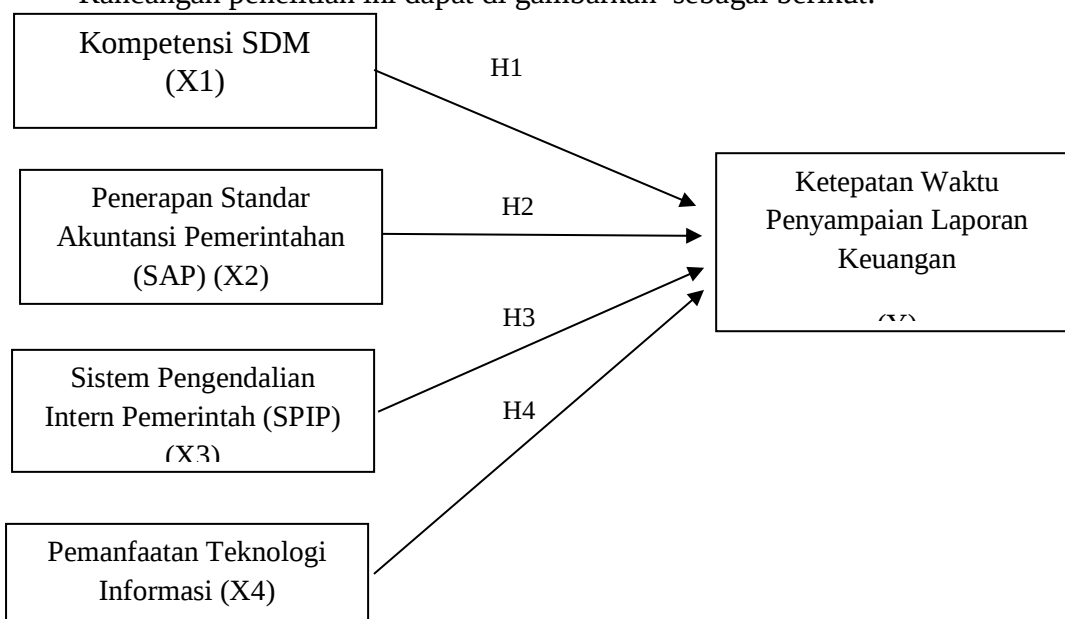
PP No. 60 Tahun 2008 mengenai SPIP dijelaskan mengenai pengertiannya, yaitu suatu proses integral terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan anggotanya guna memberi keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi (BPKP, 2008). Sistem pengendalian akuntansi di pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang andal, pengamanan asset negara serta kepatuhan dalam menjalankan aturan dalam perundang-undangan. Rusvianto *et al* (2018) menyebutkan bahwa SPIP mencakup beberapa hal seperti struktur organisasi, metode serta pengukuran yang didiskusikan guna menjaga asset instansi, pengecekan ketelitian serta akuntabilitas data akuntansi, terciptanya efisiensi serta kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh pimpinan. Anthoni et al (2016) mengungkapkan bahwasannya SPIP ialah proses integral dari aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen serta pimpinan guna memberikan jaminan secara memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif serta efisien, laporan keuangan yang handal, pengamanan aset organisasi serta kepatuhan terhadap aturan yang tertera dalam perundang-undangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi guna mengelola serta menyusun laporan keuangan akan memudahkan dan mempercepat penyajian informasi keuangan daerah (Pujanira & Taman, 2017). Sistem teknologi informasi digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dokumentasi, administrasi, dan pengelolaan data keuangan daerah. Dengan penggunaan teknologi informasi akan dihasilkan informasi yang relevan serta bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan laporan tersebut guna menentukan keputusan (Astrawan et al., 2016). Pengukuran pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator seperti penggunaan komputer, software, internet dan jaringan telekomunikasi. Purnama (2016) menjelaskan sistem informasi manajemen ialah sistem yang menggunakan komputer dalam pengolahan dan penyediaan informasi bagi penggunaanya.

Kerangka Berpikir

Rancangan penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Konsep Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tipe kausalitas. Berdasarkan landasarn teori dan hipotesis yang dipaparkan sebelumnya penelitian ini menguji komptensi SDM, penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pengendalian *intern* pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan ialah metode data primer yang didapatkan dari hasil kuesioner yang diukur memakai skala likert. Penelitian dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Sumba Barat. Populasi pada studi ini yaitu semua pegawai yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Sampel yaitu elemen dari jumlah serta karakter yang ada di populasi (Sugiyono, 2016). Cara pengambilan sampel dalam studi ini memakai metode purposive sampling, yakni mengambil kasubag umum dan keuangan yang mengelola keuangan di setiap 50 SKPD yang bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Kuesioner yang disebarkan kepada responden diisi oleh pejabat tata usaha keuangan SKPD yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang berjumlah 50 SKPD di Pemerintah Kab. Sumba Barat. Karakteristik responden berdasarkan hasil kuesioner yaitu jenis kelamin responden terdiri dari perempuan sebesar 27 orang (64.29%), serta laki-laki sebesar 23 orang (35.71%). Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan sebanyak 32 orang (80.95%) berpendidikan

SMA, Diploma (D3) sebanyak 14 orang (11.90%), dan S1 sebanyak 4 orang (7.14%). Karakteristik responden berdasarkan masa kerja bahwa responden yang memiliki masa kerja < 5 tahun ada 5 orang (7.14%), masa kerja 5-10 tahun ada 16 orang (28.57%), dan masa kerja > 10 tahun ada 29 orang (64.28%).

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan guna melihat kesanggupan variabel dalam mengukur obyek yang memang harus diukur. Pengujian ini guna menilai kelayakan butir-butir pada suatu pertanyaan. Kuesioner yang valid yaitu apabila mengandung pertanyaan yang dapat menjelaskan obyek yang diukur menggunakan kuesioner tersebut, yang apabila pearson correlation koefisien correlation > 0,3. Hasil pengujiannya tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Instrumen

No	Variabel	Butir	Nilai Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Y _{1.1}	0,784	0,000	Valid
		Y _{1.2}	0,825		
		Y _{1.3}	0,875		
		Y _{1.4}	0,677		
2	Kompetensi SDM	X _{1.1}	0,791	0,000	Valid
		X _{1.2}	0,868		
		X _{1.3}	0,722		
		X _{1.4}	0,821		
		X _{1.5}	0,717		
		X _{1.6}	0,758		
		X _{1.7}	0,729		
		X _{1.8}	0,770		
		X _{1.9}	0,312		
3	Penetapan SAP	X _{2.1}	0,728	0,000	Valid
		X _{2.2}	0,600		
		X _{2.3}	0,765		
		X _{2.4}	0,777		
		X _{2.5}	0,652		
		X _{2.6}	0,702		
4	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	X _{3.1}	0,763	0,000	Valid
		X _{3.2}	0,762		
		X _{3.3}	0,705		
		X _{3.4}	0,746		
		X _{3.5}	0,756		
		X _{3.6}	0,548		
		X _{3.7}	0,758		
		X _{3.8}	0,708		
		X _{3.9}	0,803		
		X _{3.10}	0,724		
		X _{3.11}	0,642		
		X _{3.12}	0,562		
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	X _{3.13}	0,709	0,000	Valid
		X _{3.14}	0,605		
		X _{4.1}	0,850		
		X _{4.2}	0,898		
		X _{4.3}	0,904		
		X _{4.4}	0,743		
		X _{4.5}	0,769		

Sumber: data primer diolah (2021)

Hasil uji validitas dalam Tabel 1 didapatkan nilai korelasi yang lebih besar dari 0,3 yang nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$, artinya instrumen yang digunakan

dalam kuisioner pada tiap-tiap variabel menerangkan bahwasanya instrumen yang memenuhi kriteria validitas.

Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan guna menilai kredibilitas kuesioner selaku alat pengumpul data. Kuesioner yang reliabel yaitu jikalau jawaban responden konsisten. Alat pengukur yang reliabel yaitu jikalau memiliki nilai Alpha Cronbach $> 0,70$. Hasil pengujiannya disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	Nilai Reliabilitas	Keterangan
1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	0,797	Reliabel
2	Kompetensi SDM	0,883	
3	Penerapan SAP	0,900	
4	SPIP	0,917	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,888	

Sumber: data primer diolah (2021)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai reliabilitas pada masing-masing variabel $> 0,6$, maka dapat dinyatakan data yang digunakan adalah instrumen yang memenuhi kriteria reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan hasil Uji Normalitas nilai Asymp. Sig pada dua sisi (*2-tailed*) sebanyak $0,060 > 0,05$, yang mengindikasikan bahwasanya data penelitian berdistribusi normal sehingga layak digunakan. Uji Multikolinearitas pada tolerance memperlihatkan seluruh variabel independent memiliki nilai $> 0,10$ (10%), serta nilai FIV < 10 . Dengan demikian, antar variabel independentnya tidak adanya multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansinya $> 0,05$ yang mengindikasikan bahwasanya model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian determinasi menunjukkan nilai R Square yakni 0,756, maknanya kontribusi variabel kompetensi SDM, penerapan SAP, SPIP serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat sebesar 75,6% Adapun selebihnya yaitu 24,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain yang dikaji pada studi ini.

Uji F

Hasil Uji Anova didapatkan nilai nilai F hitung 34,850 dengan nilai signifikansinya 0,000 serta nilai tersebut $< 0,05$, yang mengindikasikan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi bisa dipakai guna memprediksi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat.

Uji Hipotesis**Tabel 3**
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi B	Std. Error	t	Sig
Kompetensi SDM	0,102	0,048	2,101	0,041
Penerapan SAP	0,129	0,048	2,705	0,010
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,089	0,040	2,221	0,031
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,181	0,063	2,861	0,006
(Constanta)	: 0,221			
F Statistik	: 34,850			
Sig F	: 0,000			
Adjusted R ²	: 0,734			

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Hasil pengujian statistik mengindikasikan kompetensi SDM mempengaruhi secara positif dan signifikan pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Kabupaten Sumba Barat. Hal ini membuktikan bahwasanya makin baik kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang ada sehingga waktu penyampaian laporan keuangan tidak akan terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan. Upaya menciptakan SDM yang berkompeten dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas merupakan wujud tanggung jawab individu terhadap pihak yang memberikan pekerjaan kepadanya. Hasil ini didukung dengan teori stewardship bahwa SDM yang kompeten dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk pelayanan kepada negara. Selain itu, hasil studi ini didukung oleh hasil studi (Maharani & Agustin, 2021) Basri et al., (2021), Dewanti & Riharjo (2020), Astrawan et al., (2016), dan Winidyaningrum & Rahmawati (2010) yang menyatakan kompetensi SDM mempengaruhi secara signifikan pada pelaporan keuangan. SDM yang berkompeten akan mampu menyelesaikan laporan keuangan secara efektif dan tepat waktu, dan tidak sejalan dengan penelitian Prasetyo (2015) bahwa SDM tidak mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Pengaruh penerapan SAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Hasil pengujian statistik mengindikasikan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan SAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat. Hal ini membuktikan penerapan SAP harus diimplementasikan pada penyusunan laporan keuangan supaya menghasilkan laporan yang bermutu. Hasil ini didukung dengan hasil kajian dari hasil penelitian dari Dewanti & Riharjo (2020), Pujanira & Taman (2017), Ardianto dan Eforis (2019) menunjukkan hasil sama bahwa penerapan SAP berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah dan tidak mendukung penelitian Ardianto & Eforis (2019) dan Inapty & Martiningsih, (2016) menunjukkan penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Pengaruh secara parsial SPIP terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Hasil pengujian statistik mengindikasikan ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara penggunaan SPIP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Pemkab Sumba Barat. Hasil memberikan gambaran bahwasanya menggunakan SPIP dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat dapat lebih tepat dalam penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan yang dilakukan oleh Prasetyo (2015), Astrawan et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan daerah. Dapat dikatakan semakin baik pengendalian internal sebuah instansi sehingga hasil pelaporan keuangannya juga akan semakin baik. Sistem pengendalian intern yang baik yaitu sistem yang bisa mencegah serta meminimalisir kesalahan dan kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sama hasilnya dengan penelitian Basri et al., (2021) yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Pengaruh secara parsial pemanfaatan teknologi informasi terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Pemkab Sumba Barat.

Hasil pengujian statistik menunjukkan ada pengaruh positif signifikan antara penggunaan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Pemda Kabupaten Sumba Barat. Hasil membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan membantu tahapan penyajian laporan keuangan sehingga pelaporannya lebih tepat waktu. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kurang memanfaatkan teknologi informasi ketika menyusun serta menyajikan laporan keuangan, dimana hal ini mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan daerahnya. Bisa dinyatakan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi signifikan pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Ardianto & Eforis (2019), Prasetyo (2015), Astrawan et al., (2016), Winidyaningrum & Rahmawati (2010) yang menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kehandalan serta ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Maharani & Agustin (2021) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peneliti memperoleh kesimpulan berdasarkan hasil uji dan dilanjutkan dengan analisis data, yaitu: 1) Kompetensi SDM mempengaruhi positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat. Hal ini menjadi pertimbangan untuk menetapkan bagian tenaga kerja pembuat laporan keuangan berdasarkan latar belakang pendidikan bidang keuangan dan akuntansi sehingga laporan yang disajikan memadai dan ketidaktepatan waktu; 2) Penerapan SAP mempengaruhi positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat. Hal ini menjadi penting untuk melakukan sosialisasi tentang standar akuntansi pemerintah kepada pegawai yang membidangi laporan keuangan, sehingga penyampaian laporan keuangan menjadi tepat waktu;

3) SPIP mempengaruhi positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat. Pemerintah perlu melakukan kegiatan pengendalian dan pemantauan dari pimpinan terhadap pegawai sehingga tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan; 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab Sumba Barat. Hal ini perlu didukung oleh jaringan internet yang ada di daerah agar tidak mengalami kendala dan hambatan, sehingga laporan keuangan yang di sampaikan tidak tepat waktu.

Saran

Sesuai simpulan penelitian bisa diberikan beberapa saran yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan pada pemerintah kabupaten Sumba Barat yaitu: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat agar memetakan dan mengembangkan kemampuan SDM pada bidangnya masing-masing, sehingga akan tercapainya akuntabilitas keuangan daerah; 2) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat agar meningkatkan pelatihan tentang SAP kepada pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi, sehingga selalu mengikuti perkembangan tentang laporan keuangan; 3) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat agar mengoptimalkan SPIP dengan melibatkan semua satuan kerja daerah dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah sesuai perundang-undangan; 3) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat agar memanfaatkan teknologi informasi dengan cara pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta jaringan internet agar pelaporan keuangan daerah semakin berkualitas dan akuntabel; 4) peneliti kedepannya yang hendak melaksanakan kajian yang selaras dengan kajian ini maka sebaiknya melakukan penelitian dengan pendekatan *mixed methods* sehingga hasil penelitian menjadi komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Animah, Bayu, S. A., & Astuti Widia. (2020). Jurnal Aplikasi Akuntansi. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, 5(1), 99–109.
- Anthoni, R., Rachmina, D., & Andati, T. (2016). Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2), 1–19. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24822
- Ardianto, Rama ; Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada dinas keuangan daerah kabupaten indramayu). *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136.
- Astrawan, K. P., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 6(3), 53–64. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9046/5852>

-
- Basri, Ilham Rizqullah ; Gurendrawati, Etty ; Muliasari, I. (2021). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketrandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 470–495.
- BPK. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006*. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- BPKP. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Buchanan, A. (1996). Toward a Theory of the Ethics of Bureaucratic Organizations. *Business Ethics Quarterly*, 6(4), 419–440. <https://doi.org/10.5840/10.2307/3857497>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180258>
- Dewanti, F. D., & Riharjo, I. B. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 1–17.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eristanti, A. B. D., & ; Putra, I. N. N. A. (2019). Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.7>
- Frederickson, H George.; Smith, K. B. (2003). The public administration theory primer. In *Choice Reviews Online* (Vol. 41, Issue 04). <https://doi.org/10.5860/choice.41-2423>
- Inapty, M. A. F. B. A. ;, & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>
-

-
- Maharani, A., & Agustin, H. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 32–49. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.343>
- Mareta, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Timeliness Publikasi Laporan Keuangan Periode 2009-2010 (Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 93. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.116>
- Prasetyo, A. R. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya MANusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*, 1(1), 37–53.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Purnama, C. (2016). Sistem Informasi Manajemen. In *Insan Global*.
- Rusvianto, Dimas ; Mulyani, Sri ; Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal Banquesyar'i*, 4(1), 33–67.
- Sudiarti, N. W., & Juliarsa, G. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1725. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p09>
- Syamsir, M., Hasmin Tamsah, & Hatma, R. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja melalui Motivasi Karyawan Hotel Claro Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 3(2), 78–91.
- Van Slyke, D. M. (2006). Agents or stewards: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(2), 157–187. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul012>
- Wibowo, O. T. A. A., Ramadhanti, W., & Sugiarto. (2018). Analisis Pendapatan Accrual Basis dan Cash Basis Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa tengah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, September 2018, 1–13.
-

Winidyaningrum, C. ; R. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketrandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.